



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan tim terpadu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kabupaten Sumedang serta untuk melaksanakan Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.58/PKTL/PPKH/PLA.2/1/2023, tanggal 16 Januari 2023, Hal Permintaan Data Subyek dan Obyek Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dalam Kawasan Hutan, dan Pembentukan Tim Teknis Perkabupaten/Kota dalam rangka kegiatan Tim Terpadu PPTPKH di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.58/PKTL/PPKH/PLA.2/1/2023, tanggal 16 Januari 2023, Hal Permintaan Data Subyek dan Obyek Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dalam Kawasan Hutan, dan Pembentukan Tim Teknis Perkabupaten/Kota dalam rangka Kegiatan Tim Terpadu PPTPKH di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan tim terpadu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan kepada masyarakat sampai dengan tingkat desa;
- b. melakukan koordinasi terkait usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat sesuai kriteria Pasal 163 ayat (2), dan dokumen permohonan sebagaimana Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021;
- c. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan koordinasi dengan tim terpadu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan tim kepada Bupati Sumedang dan tim terpadu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan.

- KETIGA : Penetapan pejabat fungsional dan unsur pada Instansi ditetapkan dengan Surat Perintah Pimpinan instansi masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PENGUASAAN
TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang.
- F. Sekretaris : Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Ahli
Muda pada Bidang Pertanahan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
3. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan
Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Camat Terkait;
6. Kepala Desa Terkait;
7. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Ahli
Muda pada Bidang Pertanahan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sumedang.
8. Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
pada Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
9. Pejabat ...

9. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
11. Unsur Analis Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.
12. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta.
13. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
14. Unsur Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001